

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi inklusif yang didefinisikan oleh BAPPENAS yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan Masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (A.A. Ngurah Gede et al., 2024). Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan dari pembangunan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan nilai pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah (SARI, 2022). Pembangunan ekonomi yang inklusif berarti juga pemerataan antar wilayah. Artinya bahwa pembangunan dapat dikatakan inklusif jika terjadi diseluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan (A.A. Ngurah Gede et al., 2024).

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi yang tinggi melainkan sebagai sarana dalam memperoleh kesejahteraan, akan tetapi pembangunan ekonomi yang tinggi adalah indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah (Hapsari, 2019). Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak karena bukan hanya memperhatikan laju kenaikan output tetapi harus memperhatikan pemerataan dan perluasan akses. Tujuan adanya pembangunan ekonomi inklusif yaitu sebagai bentuk untuk memajukan akses dan kesempatan yang luas dan merata bagi semua masyarakat serta mengurangi kesenjangan yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan ekonomi yang bisa mewujudkan pemerataan dan mendorong ekonomi yang lebih cepat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan akses atau manfaat yang sama. Ada empat indikator dalam pembangunan inklusif yakni pembangunan akses, pembangunan

berkelanjutan, pembangunan nasional, dan pembangunan inklusif yang didefinisikan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengecilkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Pembangunan inklusif merupakan pertumbuhan yang tidak mendiskriminasi sehingga membuka akses ke semua pihak yang sama terhadap pertumbuhan, serta dapat mengurangi kesenjangan pada kelompok yang kurang beruntung (Klasen, 2017). Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui 3 pilar utama yaitu pilar 1 pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, dan pilar 3 perluasan akses dan peluang. Pemerintah perlu membuat program yang matang sehingga bisa dipastikan pembangunan ekonomi bisa meningkat dan berkualitas. Sehingga pertumbuhan ekonomi inklusif harus beriringan dengan perolehan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Konsep Pembangunan ekonomi inklusif terbentuk sebagai respon terhadap ketidaksetaraan hasil pembangunan ekonomi. Dalam strategi Pembangunan nasional, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mengalirkan manfaat secara merata untuk kesejahteraan rakyat yang sejalan dengan teori *trickle-down effect* (BAPPEDA, 2016). Secara teori, rakyat kelas menengah ke atas diharapkan memberi kontribusi bagi kelompok menengah yang lebih rendah melalui pembukaan lapangan kerja dan peluang ekonomi lainnya. Namun, dalam kenyataannya, distribusi kekayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena lebih banyak terserap oleh Masyarakat menengah keatas. Kendati capaian ekonomi Indonesia tampak baik kinerjanya, tetapi pemerataan kesejahteraan antar kelas sosial masih menjadi persoalan.

Pembangunan di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi baik dari factor dalam negeri ataupun luar negeri (Deru et al., 2023). Indonesia, yang merupakan bagian dari negara berkembang di Asia Tenggara, telah mengalami hambatan besar dalam pembangunan ekonominya selama dekade terakhir. Hambatan tersebut mencakup

kesenjangan ekonomi, perbedaan tingkat pendapatan, masalah pengangguran, dan tingginya angka kemiskinan (Muhtar, 2023). Menurut Bappenas, pertumbuhan inklusif Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ekonomi berkembang lain, dengan peringkat ke-36 di kategori emerging economies (skor Inclusive Development Index 3,95). Ketimpangan pendapatan nasional juga tergolong tinggi dan stagnan selama satu dekade terakhir.

Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang difokuskan untuk akses industri. Akan tetapi produktivitas tenaga kerja Industri Besar dan Sedang ((IBS) di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan daerah pulau Jawa dan tingkat produktivitas nasional (Sari, R. D. P., & Oktora, S. I., 2021). Pembangunan di Pulau Jawa hanya terkonsentrasi di bagian barat (Kawasan Jabodetabek) dan timur (Jawa Timur), fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik di setiap daerah (Chandra, 2024).

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi walaupun luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan pulau Sumatera ataupun pulau Kalimantan. Pulau Jawa hanya terdiri dari 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di Indonesia karena jumlah penduduknya yang tinggi sehingga pembangunan akses akses di Jawa harus dilakukan. Pembangunan akses dari segala bidang harus dilakukan dan dikembangkan karena dapat mempengaruhi laju ekonomi di Pulau Jawa.

Berikut ini merupakan data pembangunan ekonomi inklusif di 6 Provinsi Pulau Jawa selama 10 tahun terakhir pada tahun 2014 hingga 2023:

Tabel 1 1 Data IPEI Provinsi di Pulau Jawa

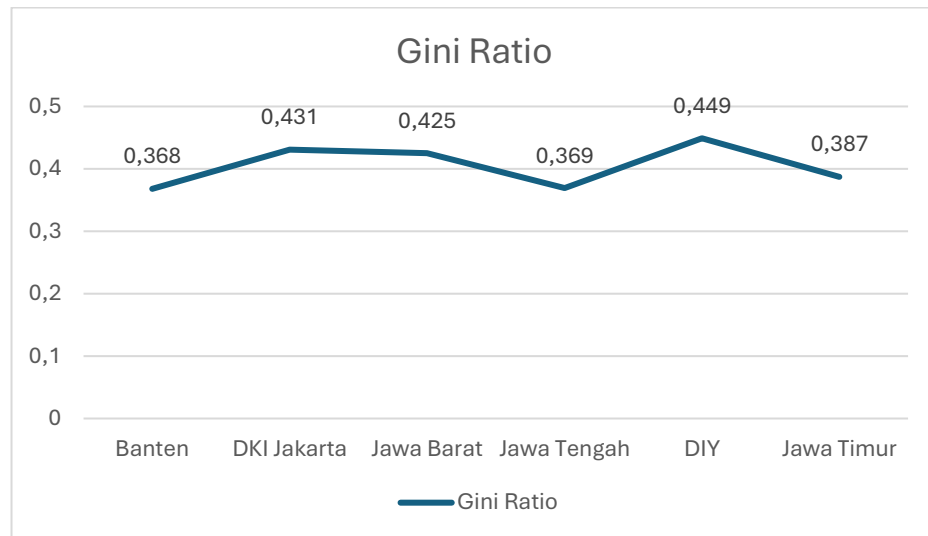
No	Provinsi	TAHUN										Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Banten	5,19	5,34	5,57	5,59	5,60	5,95	5,48	6,09	6,24	6,39	5,74
2	DKI Jakarta	6,71	7,00	7,26	7,36	7,65	7,88	7,19	7,93	7,56	7,74	7,43
3	Jawa Barat	5,45	5,69	5,89	5,96	6,02	6,18	5,63	6,02	6,12	6,22	5,92
4	Jawa Tengah	5,77	5,95	6,14	6,34	6,25	6,51	6,01	6,43	6,65	6,64	6,27
5	DIY	6,2	6,22	6,39	6,5	6,49	6,69	6,13	6,63	6,67	6,71	6,46
6	Jawa Timur	5,73	5,73	5,99	6,11	6,12	6,37	5,93	6,31	6,41	6,52	6,12

Sumber : Bappenas, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada enam provinsi di Pulau Jawa. IPEI merupakan indeks komposit yang mencerminkan sejauhmana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mampu memberikan keadilan akses, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan antar kelompok dan wilayah. Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mencatat nilai IPEI rata-rata tertinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 7,43%. Hal ini sejalan dengan tingginya akses terhadap pendidikan, akses digital, lapangan pekerjaan, dan investasi yang lebih merata. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Barat dan Banten cenderung memiliki rata-rata IPEI yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Dari rata-rata data IPEI di Pulau Jawa masih terjadi ketidakselarasan antara provinsi satu dengan provinsi yang lain. Nilai IPEI yang rendah menunjukkan bahwa Sebagian besar Masyarakat belum menikmati hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum bisa dikatakan inklusif karena masih terjadi ketimpangan antarwilayah sehingga konsentrasi ekonomi meningkat di wilayah maju dan keterlambatan pembangunan di wilayah tertinggal. Kondisi geografis Pulau Jawa berupa kepulauan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan pada setiap wilayah, maka pemerintah dapat lebih efisien mengelola sumber daya pada masing-masing daerah dan menyediakan akses public untuk memperlancar kegiatan ekonomi (Maimunah, Dini, 2016).

Pulau Jawa mempunyai kontribusi besar PDRB terhadap pembangunan ekonomi, namun ketimpangan pendapatan antar wilayahnya masih cukup tinggi. Ketimpangan ini dapat menghambat pencapaian pembangunan keberlanjutan, khususnya tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dapat dilihat dari Indeks Gini atau bisa disebut Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah. Gini Ratio di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang menunjukkan adanya kestabilan relatif dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut (Chandra, 2024).



Gambar 1.1 Grafik Data Gini Ratio Pulau Jawa Tahun 2023

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa memiliki rata-rata gini ratio yang tinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,405%. Dari grafik, menunjukkan bahwa setiap provinsi Pulau Jawa memiliki Tingkat ketimpangan yang berbeda. Provinsi DI Yogyakarta dengan ketimpangan tertinggi sebesar 0,449% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat dapat memiliki kekayaan yang besar, sementara Sebagian besar lainnya memiliki pendapatan yang rendah. Sedangkan di provinsi Banten sebesar 0,368% dan provinsi Jawa Tengah sebesar 0,369% keduanya memiliki nilai yang hampir sama dan merupakan provinsi dengan ketimpangan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan relative lebih merata di dua provinsi tersebut dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Pulau Jawa menunjukkan adanya upaya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, namun masih ada permasalahan ketimpangan yang perlu diatasi. Permasalahan tersebut antara lain adalah ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu, padatnya penduduk di Pulau Jawa mencerminkan adanya ketidakseimbangan kondisi ekonomi dan sosial dengan pulau lain di Indonesia. Jika semua daerah memiliki pemerataan yang sama dalam segala sektor, maka

urbanisasi besar-besaran ke Pulau Jawa akan menurun drastis karena di tempat lain pun apa yang penduduk butuhkan sudah tersedia.

Demi membangun ekonomi inklusif yang berkualitas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu pembangunan modal manusia (*Human Capital*). Sumber daya manusia dapat dibangun sedari dini melalui akses pendidikan yang memadai. Di Indonesia seseorang wajib menempuh pendidikan selama 12 tahun diharapkan nantinya mendapat pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. Pendidikan yang memiliki kualitas baik dapat meningkatkan sumber daya manusia, yang dikemudian dapat bersaing dalam pasar kerja dan bisa menyokong dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Pendidikan di Pulau Jawa pada umumnya lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa factor seperti ketersediaan akses Pendidikan, alokasi anggaran, serta keberadaan pusat pemerintah dan ekonomi nasional. Berdasarkan rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa berada diatas rata rata nasional. Seperti di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Rata- rata lama sekolah tertinggi dengan nilai sebesar 11,45% disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan rata lama sekolah sebesar 9,83%. Pendidikan terlibat dalam penyerapan teknologi modern untuk mengoptimalkan potensi dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan Pembangunan yang berkesinambungan.

Tingkat pengangguran menjadi factor yang mempengaruhi Pembangunan ekonomi inklusif. Pengangguran berpengaruh erat pada tingkat kemiskinan yang menjadi indicator dalam sub pilar Pembangunan ekonomi inklusif. Ketika pengangguran di suatu daerah memiliki angka yang tinggi maka dapat memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan penduduk serta memperlemah arah Pembangunan jangka panjang. Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Azwar, 2016).

Dalam pembangunan ekonomi inklusif ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting. Saat ini banyak di beberapa daerah mengalami ketimpangan dalam memperoleh akses pekerjaan, sehingga hal ini perlu dibenahi dan dicari solusinya. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui tinjauan apakah di suatu daerah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi seorang pengangguran

(pencari kerja), angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, dan seseorang yang sudah bekerja namun masih mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka berasal dari presentase kuantitas pengangguran terhadap kuantitas Angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka dengan angka yang tinggi di suatu daerah disebabkan oleh kesenjangan dalam pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menghambat untuk menekan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang pesat (Muslim, 2014) .

Perkembangan akses yang proporsional di Pulau Jawa dapat menjadi acuan yang memiliki peran besar untuk menunjang pembangunan ekonomi yang inklusif. Pada zaman modernisasi ini salah satu pilar penting yang diperlukan dalam era ekonomi digital saat ini yaitu akses digital, yang ditandai dengan meluasnya akses internet. Akses internet dapat menunjang dalam era digitalisasi khususnya dalam untuk membuka peluang ekonomi baru terutama dalam menyokong sektor seperti e-commerce, layanan keuangan digital, dan efisiensi bisnis lainnya (Huda et al., 2024).

Kemajuan teknologi internet berpotensi mendorong pembangunan ekonomi suatu negara karena berperan dalam menyebarluaskan informasi, mendorong konektivitas, serta memperkuat konektivitas dan jaringan bisnis. Internet juga berkontribusi dalam memperluas akses terhadap modal, memperkuat tenaga kerja dan membuka peluang di negara berkembang sehingga menjadi alat untuk melawan krisis ekonomi. Perkembangan teknologi internet akan membuat pasar bisnis semakin memiliki pangsa pasar yang luas.

Pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang lama tidak terlepas dari sektor investasi. Keberlanjutan Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang sangat bergantung pada peran strategis investasi sebagai salah satu faktor pendukung utama. Penanaman Modal Asing (PMA) atau yang biasa disebut Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN) di Pulau Jawa relative stabil sehingga mampu menggerakkan kegiatan perekonomian sehingga Pembangunan ekonomi akan meningkat seiring dengan perkembangan.

Kontribusi penanaman modal asing akan pembangunan ekonomi inklusif akan mengoptimalkan investasi yang dapat membangkitkan peluang pekerjaan dan

menumbuhkan penerimaan masyarakat. Kenaikan penerimaan masyarakat cenderung mendorong pertumbuhan konsumsi dan tabungan. Peningkatan Tabungan ini didukung oleh suku bunga bank yang rendah akan merangsang investasi karena para pelaku usaha lebih terdorong untuk menanamkan modalnya ke sektor ekonomi yang produktif. Keberadaan faktor tersebut diharapkan menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa (Yuni, 2022).

Pembangunan ekonomi inklusif salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan ekonomi yang bisa mewujudkan pemerataan dan mendorong ekonomi yang lebih cepat. Pulau Jawa merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang menjadi pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sering kali pusat perekonomian terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) sehingga kota-kota kecil atau Kawasan terpencil di Pulau Jawa sering kali disepelkan dalam hal pembangunan sehingga tertinggal dalam akses akses, pendidikan, bahkan peluang pekerjaan. Pembangunan akses yang baik akan mempertahankan daya guna, mempercepat pergerakan barang dan jasa serta menambah nilai perekonomian (Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020).

Berdasarkan gambaran umum mengenai penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Jawa dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Melalui penelitian ini dapat diketahui kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif yang berhasil diperoleh dan indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif. Indikator dalam penelitian ini adalah Rata-rata lama sekolah, Tingkat pengangguran terbuka, Akses Internet, dan Penanaman Modal Asing terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk perkembangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa dan dapat menyumbangkan partisipasi yang positif dan berguna bagi pengambil kebijakan dalam upaya pembangunan ekonomi inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh indikator Rata-rata lama sekolah,

Tingkat pengangguran terbuka, Akses Internet, dan Penanaman Modal Asing terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Jawa?

C. Batasan Masalah

Diharapkan penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Serta data yang digunakan dibatasi pada periode 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2023.

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa pengaruh Rata-rata lama sekolah, Tingkat pengangguran terbuka, Akses Internet, dan Penanaman Modal Asing terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Pulau Jawa

E. Manfaat / Kegunaan

Pada penelitian ini memiliki berbagai manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu ekonomi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang topik penelitiannya sama sebagai referensi.

2. Secara praktisi

Penelitian ini diharapkan hasil penelitiain ini dapat digunakan sebagai masukan pengembangan bagi pengambil kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.